



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU ZULKIFLI

Jabatan : **DEKAN** NHK : **685744**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.025.600.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/275 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/43 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
- 3. Tanah Seluas 383 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
- 4. Tanah Seluas 503 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL
 SENDIRI Rp. 130.000.000
- Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
- Tanah Seluas 3.809 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH,
 WARISAN Rp. 730.000.000
- 8. Tanah Seluas 683 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 140.600.000
- 9. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

216.000.000





- MOBIL, SUZUKI SIDE KICK JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	M	N. S.	Rp.	127.600.000
D. SURAT BERHARGA			Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	KPIK	KPI	Rp.	13.500.000
F. HARTA LAINNYA			Rp.	
Sub Total	WOK.	WOK-	Rp.	3.382.700.000
III. HUTANG			Rp.	105.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	16	Nh.	Rp.	3.277.700.000

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.